

Judul : Ekonomi RI tangguh hadapi ancaman resesi
Tanggal : Senin, 02 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ekonomi RI Tangguh Hadapi Ancaman Resesi

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Puteri Komarudin mengaku optimis ekonomi Indonesia tetap tangguh karena memiliki modal yang kuat untuk menghindari ancaman resesi. Selain karena fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat menghadapi gempuran pandemi Covid-18 dan ancaman krisis global.

Menurutnya, situasi perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami tantangan yang berat bahkan berujung pada ancaman resesi global.

Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh belum berakhirnya pandemi Covid-19, tensi geopolitik yang berkelanjutan, tren kenaikan inflasi, pengetatan likuiditas global, hingga dampak perubahan iklim.

"Tantangan ke depan memang tidak mudah, tetapi kita punya modal kuat untuk tetap optimis. Ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen sejak awal tahun



Puteri Komarudin

2022, inflasi terkendali, dan nilai tukar rupiah masih terus terjaga. Sisi eksternal juga masih bertahan karena neraca perdagangan dan transaksi berjalan mencatat surplus, cadangan devisa juga tinggi. Bekal ini yang membuat kita yakin Indonesia

bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di tahun 2022 dan 5,3 persen di tahun 2023," ujar Puteri Komarudin, kemarin.

Kendati demikian, Puteri juga mengimbau untuk tetap waspada terhadap berbagai ancaman global dan dampak pelemahan ekonomi negara lain terhadap situasi ekonomi domestik.

"Neraca dagang memang surplus tetapi harus tetap waspada karena sangat bergantung pada permintaan global. Apalagi sekarang, ekonomi AS dan Tiongkok mengalami pelemahan yang berakibat pada kinerja ekspor. Kondisi ini dikhawatirkan memberikan dampak rambatan kepada negara mitra dagangnya, seperti Indonesia. Terutama pada keberlangsungan industri dalam negeri, terlebih yang padat karya," ujar Srikandi Milenial Beringin di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI ini.

Untuk itu, Puteri mendorong

pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk terus memantau dan mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi global pada tahun 2023.

"Pelemahan ekonomi akibat pukulan pandemi kemarin tentu menjadi pelajaran bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk terus bersinergi dalam merumuskan bauran kebijakan. Baik dari segi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dalam negeri," jelasnya.

APBN Peredam Kejut

Wakil Rakyat Senayan dari Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) ini mengungkapkan APBN harus menjadi instrumen peredam kejut (*shock absorber*) dalam mengantisipasi risiko tersebut, terutama dengan mengoptimalkan peran bantuan

sosial untuk menopang daya beli masyarakat.

"Bantuan sosial ini terbukti mampu menjaga konsumsi masyarakat di tengah tren kenaikan harga. Tak terkecuali, Program Kartu Prakerja yang berperan efektif untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, berbagai insentif bagi pelaku UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), restrukturisasi kredit, subsidi kredit juga bermanfaat menjaga kelangsungan usaha. Stimulus ini tentu perlu dilanjutkan dan diperkuat. Namun yang jadi catatan adalah kita perlu terus memperbaiki akurasi data penerima agar bantuan sosial ini semakin tepat sasaran," tegas Puteri.

Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mendorong BI untuk terus menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah serta kebijakan makroprudensial yang longgar. ■ KAL